

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Penelitian ini memperkuat konsep pemberdayaan gender dan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gunungkidul melalui deskripsi naskah terkait Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gunungkidul yang dijabarkan berdasarkan tujuh indikator utama Pengarusutamaan Gender yaitu komitmen pemimpin daerah Kabupaten Gunungkidul, kebijakan responsif gender, lembaga yang menangani PUG, anggaran responsif gender, data terpilah di Kabupaten Gunungkidul, alat analisis Gender, dan peran serta masyarakat.
2. Penyusunan program di Kabupaten Gunungkidul telah dilakukan dengan kesadaran penuh atas pentingnya mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapannya. Sehingga PUG tercantum dalam berbagai dokumen penting yaitu mulai dari Visi, Misi, dan Strategi hingga RPJMD dan RKPD serta program - program prioritas yang disusun dan diimplementasikan oleh seluruh OPD di Kabupaten Gunungkidul.
3. Segi kebijakan, Kabupaten Gunungkidul telah menunjukkan adanya keberpihakan regulasi terhadap PUG yang ditunjukkan melalui kebijakan yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Surat Edaran Bupati, dan Surat Keputusan dari masing - masing instansi telah merujuk pada kepentingan gender dari berbagai sasaran dan tujuan kebijakan.

4. Segi anggaran telah dicapai melalui upaya - upaya yang dilakukan Perangkat Daerah yang masing - masing mempunyai perencana dan pelaksana PPRG yang terlatih yaitu adanya pedoman penyusunan dan penelaahan RKA-PD di Kabupaten Gunungkidul yang sudah didasarkan pada analisis gender dan didasarkan pada peraturan Bupati yang mengatur anggaran yaitu Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2011 Pasal 3 dan pasal 4, dan pengadaan program PUG yang dianggarkan tersendiri pada masing - masing perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul.
5. Menurut penulis, program, kebijakan, dan anggaran yang responsif gender tersebut saling berkaitan satu sama lain. Program yang responsif gender didukung oleh kebijakan yang menjadi acuan dan rekomendasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang responsif gender dan anggaran yang didasarkan pada analisis gender serta ditujukan untuk kepentingan pembangunan gender. Dalam hal ini, Kabupaten Gunungkidul telah berhasil melaksanakan program - program yang disusun berdasarkan perspektif gender yang dilakukan oleh masing-masing OPD, melakukan penyusunan hingga evaluasi anggaran yang responsif gender untuk program atau kegiatan yang dilaksanakan, serta berhasil dalam melakukan peningkatan dan mengimplementasikan kebijakan - kebijakan yang mendukung PUG.
6. Penelitian ini menemukan bahwa pendorong keberhasilan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gunungkidul adalah pertama, untuk merealisasikan pembangunan yang berbasis PUG, maka diperlukan pemahaman yang tepat mengenai gender dan PUG. Kedua, pentingnya komitmen dan peran dari

pemimpin dapat memberikan semangat dan pengaruh dalam kinerja perangkat daerah. Ketiga, komitmen tersebut diikuti oleh perencanaan program, kebijakan, dan anggaran yang matang dan didasarkan pada PUG, serta adanya partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul terlihat dari upayanya telah melakukan peningkatan dan perbaikan setiap tahunnya untuk mendukung PUG.

## **4.2 Saran**

### **4.2.1 Saran bagi Pemerintah**

Kesadaran gender merupakan hal utama dalam mendorong pembangunan gender. Maka, dalam pelaksanaannya perlu di tingkatkan kesadaran gender untuk pemerintah maupun masyarakat agar senantiasa dapat meningkatkan fokus dan kesadaran terhadap isu gender yang sangat luas lingkupnya di Kabupaten Gunungkidul. Dengan demikian, untuk meningkatkan kesadaran gender tersebut, pemerintah perlu melakukan pendekatan dan kajian yang lebih komprehensif untuk masyarakat dan OPD.

### **4.2.2 Saran bagi Masyarakat**

Konsep Pengarusutamaan Gender menyangkut banyak hal dari segi kehidupan masyarakat karena isu gender bukan hanya isu berkaitan dengan perempuan, tetapi kelompok rentan baik lagi-laki dan perempuan dalam segala usia. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat disalurkan dari berbagai cara seperti

misalnya memberikan masukan kepada pemerintah dalam *agenda setting*. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan melalui lembaga masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi, masyarakat dapat lebih berkontribusi langsung terhadap pembangunan gender di Kabupaten Gunungkidul. Kemudian, dalam dunia usaha, diharapkan pembangunan gender dapat menjadi fokus tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

#### **4.2.3 Saran bagi Peneliti**

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sedang mengupayakan Perda baru mengenai Pengarusutamaan Gender. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat memasukan Perda Pengarusutamaan Gender tersebut sebagai salah satu konsep untuk meneliti gender atau Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gunungkidul.